



Dorong Evaluasi Data Penerima Manfaat

■ DPRD Kota Yogya Soroti Fenomena Pencoretan Warga dari KMS

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif menyoroti aduan warga Kota Yogya yang tercoret dari daftar penerima manfaat Kartu Menuju Sejauhira (KMS). Legislatif menilai ada kepala keluarga (KK) yang seharusnya masih layak menerima namun sudah dianggap mandiri.

Anggota Komisi D DPRD Kota Yogya, Bambang Anjar Jatumurti, mengatakan sejumlah daftar penerima KMS untuk 2023 mengalami peningkatan dari sekitar 15 ribu menjadi 17.451. Tapi, yang sangat disayangkan terdapat warga yang tercoret, padahal statusnya belum seutuhnya keluar dari jerat kemiskinan.

"Artinya, ada tambahan sekitar 1.600an, tapi banyak yang tercoret. Kami sudah raker bersama Dinas, serta melihat paparan data. Di situ data yang tercoret dari KMS duju bersama," urainya, Jumat (3/2).

Benar saja, ia mencontohkan ada satu data warga hasil sampling yang tercoret dari daftar penerima KMS 2023 pun ternyata kondisinya masih jauh dari mandiri. Dia mengungkapkan keluarga itu hanya berpenghasilan total Rp1.800.000 per bulan dan harus menanggung tiga orang anak yang semua masih sekolah.

"Tapi, dia dianggap mandiri hanya karena mempunyai kulkas dan *smartphone*. Padahal, kulkas yang dimiliki itu untuk kebutuhan produksi dan *smartphone* untuk keperluan sekolah anak-anaknya," jelasnya.

"Mereka juga tinggal di dalam satu ruangan, harus me-

PERLU EVALUASI

- Legislatif soroti aduan warga Kota Yogya yang tercoret dari daftar penerima manfaat KMS.
- Legislatif menilai ada KK yang seharusnya masih layak menerima.
- Daftar penerima KMS untuk 2023 seharusnya meningkat dari sekitar 15 ribu menjadi 17.451.
- Pemkot Yogya menilai daftar penerima KMS ini sudah tetap.

nanggung sekolah tiga anak itu, kan, sangat jauh dari kecukupan, karena UMK Kota Yogya saja sudah diatas Rp2 juta. Tapi, dari hasil verifikasi, mereka termasuk kriteria mandiri," imbuh Bambang.

Alhasil, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong Pemkot Yogya, untuk melakukan evaluasi, terkait mekanisme dan indikator penentuan penerima KMS. Sejauh ini, pihaknya berupaya mengadvokasi sejumlah KK yang tercoret agar terakup jaminan sosial, termasuk di sektor pendidikan juga.

"Karena yang kemarin mengeluh, mengadu ke dewan itu karena khawatir kehilangan akses (jalur afirmasi) untuk masuk ke sekolah negeri. Kami coba advokasi semuanya," urainya.

Pihaknya mendorong dinas terkait untuk mendata warga yang dapat KMS, dan yang tercoret. "Terus buka posko pengaduan supaya warga bisa mengadu biar disurvei Pem-

kot," lambah Bambang.

Diberitakan sebelumnya, Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Yogya, Agus Budl, mengatakan data KMS yang bersumber dari validasi sejak 2022 sudah fix. Bahkan, anggaran yang bersumber dari APBD Kota Yogya pun telah ditetapkan untuk periode selanjutnya ke depan.

"Jadi, kami tidak bisa menambah. Tapi, kalau ada usulan yang dirasa itu tidak tepat sasaran, kami bisa mencaibutnya, setelah ada bukti yang kuat," cetusnya, ketika menerima langsung audiensi dari warga.

"Kalau yang dipermasalahkan itu soal jalur afirmasi untuk masuk sekolah negeri, sekarang kan sudah ada bantuan tunggakan pendidikan di Kota Yogya, meski dia tidak mendapat KMS sekalipun," lanjut Agus.

Pewakilan warga, Yogi Prasetyo, sebelumnya menyampaikan proses validasi KMS yang digulirkan Pemkot Yogya pada 2022 lalu dianggap tebang pilih dan tidak tepat sasaran. Padahal, di samping jaminan sosial, pemegang KMS selama ini juga mendapatkan "keistimewaan" berupa jalur khusus untuk akses sekolah negeri.

"Karena dilaporkan warga yang masuk ke kita ada yang memang benar-benar membutuhkan itu, tetapi malah tidak mendapatkan KMS. Berarti, tebang pilih juga untuk pendidikan dan sangat merugikan," ura warga Wirogunan, Kemantren Mergangsan itu. (aika)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005